



Harap Tenang

JOGJA—Tahapan pilkada di Kota Jogja dan Kulonprogo memasuki masa tenang mulai Minggu (12/2) besok sampai Selasa (13/2) atau sehari sebelum pemungutan suara. Semua pihak dianjurkan menjaga suasana yang sudah lengang agar tidak gaduh.

Ujang Hasanudin & Rima Sekarani I. N.
redaksi@harianjogja.com

Komisioner KPU Kota Jogja Bidang Pendidikan Politik dan Humas, Sri Surani, mengimbau banyak kalangan untuk menjaga situasi damai selama masa tenang pilwalkot. "Tidak ada kampanye dalam bentuk apapun," ujar dia, Jumat (10/2).

Rani, panggilan akrabnya, juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan masa tenang sebagai periode menimbang pilihan secara matang sehingga dapat menggunakan hak suara secara rasional pada 15 Februari nanti. Ia mengapresiasi kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk tidak mengambil jatah kampanye terbuka demi kedamaian Kota Jogja.

"Tingkat keramaian dalam pilkada di

► Politik uang diwaspadai selama masa tenang.

► 15 Februari ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Kota Jogja memang kalah dibandingkan dengan daerah lain, kami Jamin Jogja kami damai," kata Rani.

Kedua pasangan calon, Imam Priyono dan Achmad Fadli serta Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi juga sudah menyatakan komitmen menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Jogja. Kedua pasangan sama-sama berjanji tidak melakukan politik uang yang bisa merusak demokrasi.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Jogja periode 2017-2022

menilai masa tenang dinilai rawan kampanye terselubung dalam bentuk penyebaran brosur dan bagi-bagi uang.

Anggota Panwas Kota Jogja Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Iwan Ferdian Susanto meminta semua pengawas

tempat pemungutan suara (TPS) agar berkeliling setiap saat di masa tenang.

Pengawas TPS, kata dia, tidak hanya mengawasi proses pemungutan suara. Total ada 794 pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS yang sudah ditetapkan KPU Kota Jogja.



<https://goo.gl/wnqTY6>

• Lebih Lengkap Halaman 8

Harap Tenang...



JIBU/Harian Jogja/Desi Suryanto

Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah (IKPMD) menggelar aksi damai di depan kantor KPU Kota Jogja, Jumat (10/2).

Sementara itu, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) DIY siap mengawal proses pilkada di Kota Jogja yang aman. Komitmen itu disampaikan melalui aksi damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Jumat (10/2).

Ketua IKPMDI DIY, Hafis Arif mengatakan unjuk rasa itu merupakan bentuk keprihatinan menyaksikan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah yang masih diisi saling hujat dan provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

Kegaduhan politik dalam pilkada, kata dia, paling nyata terjadi di Jakarta. IKPMD yang merupakan kumpulan pelajar dan mahasiswa mahasiswa dari berbagai daerah yang tinggal DIY akan berupaya menjaga agar kegaduhan Pilkada Jakarta tidak sampai merembet. Jogja, menurutnya,

sebagai barometer diharapkan bisa memengaruhi terhadap situasi penyelenggaraan pilkada.

Di Kulonprogo, bukan hanya pasangan calon bupati dan wakil bupati yang harus berhenti dari kegiatan kampanye. KPU Kulonprogo juga diminta menghentikan aktivitas sosialisasi Pilkada 2017.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kulonprogo, Tamyus Rochman, mengatakan setiap tim pasangan calon sudah diimbau untuk membersihkan alat peraga kampanye (APK) sejak Minggu dini hari pukul 00.00 WIB. Jika masih ada APK yang terpasang pada masa tenang, Panwaslu Kulonprogo akan menertibkannya bersama instansi terkait lain. "Nanti kami pantau perkembangan situasinya," tegasnya.

Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengatakan, hari pertama masa tenang

menjadi batas dari pendistribusian formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih. Formulir tersebut biasanya dianggap masyarakat sebagai undangan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Jika belum menerima formulir C6 pada hari itu, masyarakat diharapkan segera melapor ke Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Isnaini menambahkan, pendistribusian logistik selanjutnya dilakukan pada akhir masa tenang, Selasa pekan depan. KPU Kulonprogo bakal memprioritaskan distribusi agar menyebar wilayah perbukitan menoreh. "Sebelum distribusi logistik, surat suara yang rusak akan dimusnahkan," ujar Isnaini.

Kapolres Kulonprogo, AKBP Nanang Djunaedi menyatakan telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait pengamanan masa tenang Pilkada 2017. Rapat koordinasi bakal digelar Sabtu (11/2) besok. Menurutnya, salah satu materi yang akan dibahas adalah mengenai penertiban APK. "Kami juga tetap mengantisipasi adanya politik uang di masa tenang, meski sebenarnya sejak jauh-jauh hari juga sudah ada pemantauan," ungkap Nanang.

Libur Nasional

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menetapkan 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional. Penetapan itu bertepatan dengan

hari pencoblosan pilkada serentak di 101 daerah. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.3/2017, yang ditetapkan oleh Jokowi pada Jumat kemarin di Jakarta.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD DIY Istidjab Danunagoro memprediksi, jumlah tamu yang menginap akan naik sampai 10% menyusul penetapan libur nasional pada hari pencoblosan.

"Karena Rabu itu pertengahan pekan jadi mungkin tidak terlalu ramai. Minimal tambah lima persen, maksimal 10 persen," kata Istidjab.

Kenaikan kunjungan diprediksi akan terjadi untuk hotel-hotel di ring pertama Malioboro, terutama hotel bintang dua dan tiga.

Libur 15 Februari bertepatan dengan berlangsungnya program paket Jogja Heboh. Paket Jogja Heboh merupakan program PHRI, Asosiasi Perjalanan Wisata (Asita), dan pelaku pariwisata lainnya di Jogja yang menyajikan paket wisata murah selama Februari.

Ada 28 hotel yang sudah bersedia memberikan diskon 60% dan Asita juga sudah menyiapkan paket tur hanya Rp150.000.

Public Relation Admin Santika Premiere Hotel, Satri, mendukung adanya libur nasional tersebut karena karyawan yang tinggal di daerah Pilkada tidak harus izin untuk dapat menggunakan hak suaranya.

(Bernadeta Dian Saraswati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005